

KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PEMBATALAN PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL MENURUT PENGADILAN NEGERI KARAWANG

ABSTRAK

Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan kesadaran terkait perlindungan konsumen di Indonesia dengan berbagai pembentukan lembaga yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) merupakan salah satu badan yang dibentuk dengan kewenangan menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen melalui cara mediasi atau konsiliasi atau arbitrase. Dalam hal dilakukannya penyelesaian sengketa konsumen, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi menurut hukum formilnya. Dalam hal penyelesaian sengketa konsumen, masih banyak penegak hukum yang belum memahami hukum formilnya sehingga menimbulkan putusan yang tidak memenuhi syarat formil. Salah satu kasus yang terjadi adalah dalam Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-BPSK/2019/PN.Kwg dimana putusan BPSK Karawang diajukan keberatannya oleh pelaku usaha karena adanya dugaan pelanggaran syarat formil. Penelitian ini berjenis yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data dikumpulkan secara studi kepustakaan dan disajikan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim untuk membatalkan putusan BPSK Karawang dikarenakan tidak memenuhi dua hal, yakni tidak adanya persetujuan pelaku usaha untuk melakukan penyelesaian sengketa di BPSK dan di dalam putusan BPSK tidak ada keterangan mekanisme penyelesaian sengketa apa yang diambil. Kemudian atas adanya pembatalan putusan BPSK tersebut mengakibatkan adanya ketidakpastian hukum karena di dalam UUPK, putusan BPSK bersifat final dan mengikat. Sehingga dalam hal perlindungan konsumen perlu memperhatikan bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan dari mulai proses legislasi pembentukan peraturannya yang dirumuskan secara jelas dan dari proses penyelesaian sengketa perlu memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bentuk perwujudan dari kepastian hukum.

Kata kunci: Kepastian Hukum, Pembatalan Putusan BPSK, Syarat Formil, Perlindungan Konsumen.

**LEGAL CERTAINTY TOWARDS BADAN PENYELESAIAN SENGKETA
KONSUMEN DECISION THAT UNFULFILLED FORMAL
REQUIREMENTS ACCORDING TO KARAWANG DISTRICT COURT**

ABSTRACT

The government continues to strive to increase awareness regarding consumer protection in Indonesia by establishing various institutions mandated by Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection (Law 08/1999). Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) is a body established with the authority to handle and resolve consumer disputes through mediation or conciliation or arbitration. In the case of consumer dispute resolution, there are conditions that must be met according to the formal law. In terms of consumer dispute resolution, there are still many law enforcers who do not understand the formal law, resulting in decisions that do not meet formal requirements. One of the cases that occurred was in Decision Number 1/Pdt.Sus-BPSK/2019/PN.Kwg where the BPSK Karawang decision was objected to by the entrepreneur because of an alleged violation of formal requirements. This research is a normative juridical type with statutory and case approaches. Data was collected by means of a literature study and presented qualitatively. The results of the study showed that the judge's consideration to cancel the BPSK Karawang decision was due to not fulfilling two things, namely the absence of the entrepreneur approval to carry out dispute resolution at BPSK and in the BPSK decision there was no description of what dispute resolution mechanism was taken. Then the cancellation of the BPSK decision resulted in legal uncertainty because in Law 08/1999, the BPSK decision characteristics are final and binding. So that in terms of consumer protection, it is necessary to pay attention to the forms of protection provided starting from the legislative process for the formation of regulations that are clearly formulated and from the dispute resolution process, it is necessary to pay attention to the applicable laws and regulations as a form of embodiment of legal certainty.

Keywords: *Legal Certainty, Cancellation of BPSK Decision, Formal Requirements, Consumer Protection*